

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung

Dwi Wulan Fitriani

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Indonesia
Email: wulanfitriani102@gmail.com*

Dyah Pravitasari

*Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, Indonesia
Email: dyahpravitasariainta@gmail.com*

Abstract : The focus of the research is to determine the partial and simultaneous effect of independent variables (financial reporting transparency, accountability, and village government responsibility) on the dependent variable (community participation in village development in Bandung Tulungagung). As well as knowing which independent variables have the most influence on the variable). The approach used by the researcher is quantitative. The data uses the primary type by distributing questionnaires to the Bandung Tulungagung village community and referring to the *Likert Scale*. The sample was taken by purposive sampling technique and obtained from the calculation of the Slovin formula so as to obtain 97 respondents. The data obtained were analyzed using SPSS 16.0 and tested the output of the validity test, reliability test, data normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, partial t test, simultaneous F test, coefficient of determination (R^2). SPSS 16.0 test gain and the analysis that has been carried out shows that the transparency of financial reports, accountability, and responsibility of the village government significantly influence either partially or simultaneously on community participation in village development in Bandung Tulungagung. And the results of the Standardized Coefficients Beta test show that the independent variable that has the most influence on the dependent variable is the financial statement transparency variable.

Keywords: *Financial Report Transparency, Accountability, Village Government Responsibility, Community Participation, Village Development*

Abstrak : Fokus penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan variabel bebas (transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa) terhadap variabel terikat (partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung). Serta mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun pendekatan yang dipakai peneliti yaitu kuantitatif. Data menggunakan jenis primer dengan penyebaran angket kepada masyarakat desa Bandung Tulungagung serta mengacu pada *Skala Likert*. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh dari perhitungan rumus Slovin sehingga memperoleh 97 responden. Perolehan data dianalisis dengan memakai SPSS 16.0 dan menguji output dari uji kevalidan, uji reliabel, uji kenormalan data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji t parsial, uji F simultan, koefisien determinasi (R^2). Perolehan uji SPSS 16.0 dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa secara signifikan berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Dan hasil uji *Standardized*

Pengaruh Transparansi, Laporan keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung

Coefficients Beta menunjukkan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat adalah variabel transparansi laporan keuangan.

Kata Kunci : *Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Responsibilitas Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Secara umum desa memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan kota, dimana kota lebih maju dan berkembang, berbanding terbalik dengan desa yang memiliki permasalahan cukup kompleks. Misalnya mulai dari tingginya kemiskinan, rendahnya kesehatan pada masyarakat dan disektor pendidikan yang belum memadai, sarana prasarana yang belum memadai, serta SDM yang masih rendah. Namun disisi lain permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan adanya pembangunan desa. Pembangunan tersebut diantaranya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, meningkatkan pelayanan publik, penganggulangan kemiskinan, serta perbaikan infrastruktur.

Adanya dasar pembangunan berkelanjutan dinilai menjadi suatu hal yang dapat berdampak pada perkembangan desa. Fokus pembangunan berkelanjutan bukan hanya pada masyarakat masa kini melainkan juga mengarah pada masyarakat dimasa depan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini umumnya mencakup diberbagai aspek. Mengutip Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa. Dimana pasal 78 (1) menjelaskan bahwa membangun rumah tangga desa berarti meningkatkan ketentraman dan kemakmuran warga desa. Sebagai bentuk upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah desa akan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti melakukan pembangunan diberbagai sektor, dan mengembangkan ekonomi sekitar dengan menggali potensi yang ada di desa.¹

Penerapan pengembangan desa yang berkelanjutan yaitu untuk memperkuat fondasi ekonomi suatu negara, mengurangi tingkat kemiskinan serta mengurangi kesenjangan perkembangan antar wilayah sehingga nantinya akan membuat perubahan sosial menjadi lebih baik. Kepala desa bertugas mengkoordinasikan program atau kegiatan yang telah disusun sebagai upaya pembangunan desa untuk nantinya direalisasikan oleh aparat desa dengan bekerjasama pada warga sekitar. Dalam mengkoordinasikan program pengembangan dan pembangunan desa, segala persiapan dan pelaksanaannya mulai dilaksanakan ketika APBDesa tersedia. Pengembangan desa dilaksanakan atas cakupan: pengembangan desa berskala lokal desa dan pengembangan kawasan yang masuk pada wilayah ke desa.²

Namun terdapat permasalahan yang sering dihadapi pemerintah desa sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan yaitu seperti adanya kendala baik dari pembiayaan maupun dari penolakan masyarakat itu sendiri. Penyebabnya adalah karena infrastruktur atau program yang telah direalisasikan pemerintah desa kerap tidak tepat sasaran dengan yang dikehendaki warga desa. Dari faktor itulah, pemerintah seharusnya dapat menentukan keputusan untuk melibatkan warga desa dalam upaya mengembangkan desa itu sendiri. Beberapa pedoman yang dapat diterapkan pada pengurusan keuangan adalah akuntabilitas yang mengarah pada perolehan hasil, kemampuan dalam mengelola keuangan, proporsionalitas, transparansi, pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berwenang.³

¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

² Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 48.

³ Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik* (Malang: UB Press, 2013), 39.

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat tentang kondisi keuangan yang sebenarnya, mengingat masyarakat punya hak atas informasi tersebut secara transparan dan masyarakat punya hak untuk meminta tanggungjawab pemerintah dalam mengelola potensi desa yang telah diamankan padanya serta menjadikan perundang-undangan sebagai landasannya.⁴

Dalil berikut berkaitan dengan transparansi yaitu pada QS. An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁵

Adapun kaitannya QS. An-Nisa Ayat 58 dengan transparansi yaitu dimana Allah telah menyuruh untuk menyampaikan amanat terhadap seseorang yang berhak menerima amanat tersebut, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Selain dalil diatas, berikut adalah hadits yang menjelaskan tentang transparansi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا اسْتُخْلِيفَ أَبُو بَكْرٍ : الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ جِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي، وَشَعَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ⁶

Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, inti penjelasannya dari hadits tersebut yaitu pemimpin harus transparan dalam memerintah. Mencontoh Abu Bakar Al-Shiddiq, ketika menjadi khalifah beliau mengumumkan kepada rakyatnya bahwa beliau beserta keluarganya akan memakan dari Baitul Mal kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kesibukan beliau sebagai khalifah membuatnya tidak sempat mencari nafkah sebagai pedagang. Apa yang diutarakan beliau ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam mengelola keuangan umat, serta pertanggungjawaban terhadap langkah yang diambil sebagai pemimpin.

Tujuan dari transparansi diantaranya: menciptakan komunikasi lebih luas serta menciptakan kerjasama antara kelompok, mendorong perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya seperti korupsi dan kecurangan, adanya transparansi mampu menciptakan akuntabilitas disetiap pengambilan kebijakan, membuat masyarakat lebih percaya dan yakin kepada pimpinan.⁷

Indikator pendukung transparansi antara lain: peraturan yang memuat jaminan hak untuk mendapatkan informasi, website (*e-government*, dsb), iklan layanan masyarakat, media cetak dan elektronik, papan pengumuman. Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan akan memungkinkan tumbuhnya peran masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.⁸

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan” (2005).

⁵ Al-Qur’an Al-Karim.

⁶ *Al-Hadits*, n.d.

⁷ Bevaola Kusumasari, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), 19.

⁸ Astri Dwi S dkk, “Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik,” *Profesional FIS UNIVED* 7, no. 1 (2020): 43–49.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi seseorang yang memegang amanah atau pimpinan yang harus bertanggungjawab, menyampaikan, memberitahukan, serta menunjukkan laporan setiap aktivitasnya terhadap seseorang yang memberi kepercayaan sehingga mereka mempunyai hak dan kewenangan dalam memintakan tanggungjawab pada pimpinan.⁹

Berikut dalil yang berkaitan dengan akuntabilitas yaitu QS. Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا بِيَدِكُمْ وَاللَّهُ بِيَدِكُمْ وَبِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ

Adapun kaitannya QS. Al-Mujadalah ayat 11 dengan prinsip akuntabilitas yaitu, dimana seseorang yang berilmu dalam hal ini paham betul tentang prinsip akuntabilitas serta menerapkannya dengan baik dalam suatu pekerjaan maka Allah akan meninggikan derajatnya, yaitu bagi orang yang memiliki iman dan ilmu, karena Allah Maha Teliti pada segala sesuatu yang dilakukan hambanya.

Selain dalil diatas, berikut adalah hadits yang menjelaskan tentang akuntabilitas :

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أمانةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ۙ

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inti penjelasan dari hadits tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”. Sehingga dapat dikatakan, ketika seorang pemimpin telah diberikan amanah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maka ia harus jujur, tanggung jawab, tepat janji, tegas. Apabila seorang pemimpin tidak bisa melaksanakan sifat tersebut maka ia sama dengan orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki agama.

Beberapa fungsi dari akuntabilitas adalah adanya kontrol atau pengawasan demokratis dengan membangun sistem yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat yang lebih luas, penerapan akuntabilitas yang baik akan mencegah tindakan korupsi serta penyalahgunaan wewenang, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada tugas yang dijalankan.

Akuntabilitas memiliki empat dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, diantaranya: (1) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan kepatuhan terhadap hukum, (2) akuntabilitas proses berkaitan dengan tahapan/proses yang digunakan dalam melaksanakan tugas, (3) akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan alternatif program dengan hasil optimal dengan biaya yang minimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (4) akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.¹²

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 20.

¹⁰ *Al-Qur'an Al-Karim*.

¹¹ *Al-Hadits*.

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 21–22.

Responsibilitas

Prinsip dasar responsibilitas yaitu bahwa perusahaan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut menjadi wujud tanggungjawab pemerintah terhadap warga dan lingkungan sekitar dalam menciptakan kelangsungan usaha jangka panjang, serta syarat memperoleh pengakuan sebagai *good corporate citizen*.¹³

Sesuai dengan QS. Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ¹⁴

Adapun kaitannya QS. Al-Muddassir ayat 38 dengan responsibilitas yaitu, Allah telah menyuruh setiap hambanya untuk bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya.

Selain dalil diatas, berikut adalah hadits yang menjelaskan tentang responsibilitas :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹⁵

Berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, inti penjelasan dari hadits tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, baik itu seorang imam, seorang suami, seorang isteri, bahkan seorang pembantu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya.

Aspek responsibilitas mencakup beberapa hal diantaranya dibidang ekonomi dengan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat, bidang hukum sebagai wujud taatnya pada peraturan dan undang-undang, pada bidang moral yaitu sebagai bentuk tanggungjawab dan keadilan baik untuk pemangku kepentingan maupun untuk masyarakat, dibidang sosial contohnya *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang merupakan bentuk pedulinya pimpinan pada kesejahteraan masyarakat serta alam sekitar, dan pada bidang religius setiap kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk ibadah sesuai keyakinan yang dianutnya.¹⁶

Jenis responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Responsibilitas perorangan mencakup adanya pengakuan terhadap tindakan dan etika ketika mengambil keputusan, sedangkan responsibilitas institusi mencakup perlindungan terhadap politik dan sumber daya, adanya kepastian kebijakan dan prosedur dalam melindungi sumber daya institusi.¹⁷

¹³ Hendrik Manosoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Jakarta Selatan: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 25.

¹⁴ *Al-Qur'an Al-Karim*.

¹⁵ *Al-Hadits*.

¹⁶ Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 158.

¹⁷ Bevaola Kusumasari, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, 19–20.

Partisipasi Masyarakat

Sedangkan partisipasi itu sendiri diartikan sebagai keaktifan, keikutsertaan, dan terlibat langsung secara pribadi atau kelompok sosial dengan kesadaran masyarakat tanpa adanya kontrol dari pihak manapun.¹⁸ Dimensi pada partisipasi masyarakat dapat diukur melalui: masyarakat yang mengambil keputusan, masyarakat yang merencanakan pembangunan dengan pemerintah desa, dan bersama sama menikmati hasil.¹⁹ Berikut bentuk dari partisipasi masyarakat antara lain kontribusi dalam bentuk tenaga, iuran masyarakat seperti uang dan barang, membangun proyek desa dari dana iuran pribadi/lembaga, sumbangan dalam bentuk kerja (tenaga ahli setempat atau gotong royong warga).

Pembangunan Desa

Sementara pembangunan partisipatif merupakan unsur pembangunan yang ada pada lingkungan desa, diatur oleh kepala desa serta menitikberatkan kesatuan, persaudaraan, serta saling tolong menolong sebagai wujud kesatuan dan persatuan sosial.²⁰ Dimensi indeks dalam pembangunan desa diantaranya dalam desa tersedia pelayanan utama seperti kesehatan dan pendidikan, keadaan bangunan yang memadai, adanya akses jalan dan transportasi di desa, layanan umum yang memadai, kelengkapan fasilitas pemerintahan.²¹

Pada penelitian sebelumnya, Yohanes dan Asih (2018) menyatakan bahwa variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan pada keikutsertaan masyarakat dalam proses Alokasi Dana Desa.²² Sedangkan pada penelitian Emilianus dan Sulistyono (2019) menyatakan bahwa semua variabel penelitian yaitu keterbukaan, akuntabilitas dan keterlibatan warga desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdampak pada pengembangan desa.²³ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eka, dkk (2017) menyimpulkan cara memimpin kepala desa mempengaruhi ikut sertanya warga desa dalam pengembangan desa.²⁴

Kebaruan yang terletak pada penelitian ini yaitu pada satu variabel bebas yang dipakai. Dimana peneliti menggunakan variabel independen tanggung jawab pemerintah desa

¹⁸ Adrian Tawai dan Muh Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Kendari: Literacy Institute, 2017), 61.

¹⁹ Adrian Tawai dan Muh Yusuf, 62–76.

²⁰ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, 18.

²¹ Hindun Barokah, *Indeks Pembangunan Desa 2014 Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015), 6–8.

²² Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018): 1–7.

²³ Emilianus Jaa dan Sulistyono, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7, no. 1 (2019): 1–9.

²⁴ Eka Aprita Rati dkk, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin,” *Bhineka Tunggal Ika* 4, no. 1 (2017): 71–80.

yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Adapun fokus penelitian yaitu bertujuan mengetahui pengaruh secara parsial masing masing variabel transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Selain itu juga mengetahui pengaruh secara simultan semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Serta mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai penelitian yaitu kuantitatif. Berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada pengaruh antar dua variabel atau lebih sehingga penelliti memilih jenis asosiatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Obyek yang digunakan peneliti yaitu Desa Bandung Tulungagung. Adapun populasi penelitian ini berjumlah 3.241 jiwa yang merupakan total keseluruhan warga desa Bandung Tulungagung per tahun 2020. Sampel diambil dengan perhitungan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel ²⁵

Dari rumus yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% (0,1). Perhitungan sampel tersebut adalah:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{3.241}{1+(3.241 \times 0,1^2)} = \frac{3.241}{33,41} = 97 \text{ responden}$$

Selain itu sampel dipilih dengan teknik *non probability sampling* (sampling non random), dan teknik lain yaitu *purposive sampling* (sampling pertimbangan), yang merupakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan peneliti. Sampling pertimbangan ini tepat jika digunakan untuk studi kasus.²⁶ Data yang diperoleh pada penelitian berasal dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert. Hasil perolehan kuesioner yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS 16.0 dengan menguji output dari : uji kevalidan, uji reliabel, uji kenormalan data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji t parsial, uji F simultan, koefisien determinasi (R²).

²⁵ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), 120.

²⁶ Ali Mauludi, *Statistik 1* (Jakarta Timur: Alim's Publishing Jakarta, 2017), 327.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Merupakan sebuah uji untuk melihat kevalidan instrumen penelitian. Dengan uji validitas peneliti akan tahu sejauh mana kuesioner yang telah disajikan mampu mengukur variabel yang digunakan untuk penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan yang dilakukan pada uji validitas diantaranya:

- Variabel dapat diarik kesimpulan valid ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$
- Variabel dapat diarik kesimpulan tidak valid, ketika $r_{hitung} < r_{tabel}$ ²⁷

Untuk melihat nilai dari r_{tabel} yaitu dengan menghitung df, dimana $df = n-2$. Pada penelitian ini diketahui $df = 97-2 = 95$ dengan nilai signifikansi 5%. Sehingga diketahui nilai $r_{tabel} = 0,202$

Tabel 1

Hasil Uji Validitas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}
Variabel Transparansi Laporan Keuangan (X₁)		
1	0,533	0,202
2	0,645	0,202
3	0,777	0,202
4	0,626	0,202
5	0,749	0,202
6	0,569	0,202
7	0,596	0,202
Variabel Akuntabilitas (X₂)		
1	0,746	0,202
2	0,549	0,202
3	0,596	0,202
4	0,871	0,202
5	0,887	0,202
Variabel Responsibilitas Pemerintah Desa (X₃)		
1	0,636	0,202
2	0,706	0,202
3	0,750	0,202
4	0,718	0,202
Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)		
1	0,595	0,202
2	0,629	0,202
3	0,818	0,202
4	0,761	0,202
5	0,730	0,202
6	0,766	0,202

Olahan Output SPSS 16.0

²⁷ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 64, <https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ>.

Hasil output tabel 1 diketahui seluruh item variabel X dan variabel Y mempunyai hasil $r_{hitung} > r_{tabel} (0,202)$, maka dinyatakan semua item soal valid untuk mengukur setiap variabel yang digunakan.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas yaitu salah satu uji untuk melihat apakah kuesioner yang disajikan dalam penelitian tersebut memperoleh hasil yang konsisten atau tidak. Artinya, ketika kapanpun kuesioner tersebut digunakan akan memperoleh hasil yang sama. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu, instrumen (kuesioner) dapat disimpulkan reliabel apabila hasil *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ ²⁸

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
X ₁	0,764
X ₂	0,793
X ₃	0,659
Y	0,798

Olahan Output SPSS 16.0

Hasil output tabel 2 terlihat *Cronbach's Alpha* setiap variabel yaitu $> 0,6$. Sehingga dikatakan keseluruhan pertanyaan dalam kuesioner tersebut dalam mengukur setiap variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Sebuah uji yang digunakan sebagai alat ukur apakah data pada penelitian menghasilkan distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data ketahui melalui beberapa cara diantaranya:²⁹

- Uji Kolmogorov-Smirnov*, akan menghasilkan distribusi normal ketika nilai signifikansi data atau nilai kemaknaan $> 0,05$ (sampel besar > 50)
- Shapiro-Wilk*, akan menghasilkan distribusi normal ketika nilai signifikansi data atau nilai kemaknaan $> 0,05$ (sampel besar ≤ 50)

²⁸ Ratna Wijayanti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Lumajang: Widyagama Press, 2021), 123.

²⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, 85.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		97	
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.25720159	
Most Extreme Differences	Absolute	.074	Olahan Output SPSS 16.0
	Positive	.044	
	Negative	-.074	
Kolmogorov-Smirnov Z		.725	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.670	

a. Test distribution is Normal.

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada output tabel 3 tersebut diketahui hasil signifikansi yaitu 0,670, dimana nilai $0,670 > 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan data penelitian tersebut mempunyai distribusi data normal.

Uji Multikolinieritas

Sebuah uji penelitian yang diaplikasikan untuk melihat korelasi atau keterkaitan antar variabel bebas yang digunakan, apakah variabel bebas tersebut terdapat korelasi atau tidak. Pengambilan keputusan uji multikolinieritas sebagai berikut :

- a) Variabel bebas terhindar multikolinieritas ketika hasil hitung *VIF* sekitar angka 1-10
- b) Variabel bebas terhindar multikolinieritas ketika hasil hitung *Tolerance* $> 0,10$ ³⁰

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	6.742	3.261		2.068	.041		
1 Transparansi Laporan Keuangan	.298	.083	.356	3.568	.001	.722	1.385
Akuntabilitas	.237	.096	.240	2.469	.015	.764	1.309
Responsibilitas Pemerintah Desa	.332	.157	.185	2.110	.038	.932	1.073

³⁰ Echo Perdana, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22* (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 47.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	6.742	3.261		2.068	.041		
1 Transparansi Laporan Keuangan	.298	.083	.356	3.568	.001	.722	1.385
Akuntabilitas	.237	.096	.240	2.469	.015	.764	1.309
Responsibilitas Pemerintah Desa	.332	.157	.185	2.110	.038	.932	1.073

a. Dependent Variable : Partisipasi Masyarakat
Olahan Output SPSS 16.0

Hasil output tabel 4 tersebut, terlihat *VIF* dan *Tolerance* pada tiap-tiap variabel bebas yaitu : *VIF* pada variabel bebas transparansi laporan keuangan sebesar 1,385, akuntabilitas sebesar 1,309, responsibilitas pemerintah desa sebesar 1,073. Hasil *VIF* untuk semua variabel bebas menunjukkan bahwa nilainya 1-10, sehingga peneliti menyimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Sedangkan nilai *Tolerance* untuk variabel bebas yaitu transparansi laporan keuangan sebesar 0,722, akuntabilitas sebesar 0,764, responsibilitas pemerintah desa sebesar 0,932. Hasil *Tolerance* untuk semua variabel bebas menunjukkan bahwa nilainya > 0,10 sehingga data penelitian terhindar multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Merupakan sebuah uji untuk melihat korelasi antara masing-masing sampel atau data penelitian yang diruntutkan berdasarkan waktu. Terjadinya autokorelasi disebabkan penelitian tersebut dilakukan secara runtut sepanjang waktu dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dibawah ini pertimbangan peneliti sebelum menarik kesimpulan:

- a. Terjadi Autokorelasi Positif
Ketika $d < dL$, maka data hasil penelitian mengalami autokorelasi positif
Ketika $d > dU$, maka data hasil penelitian terhindar autokorelasi positif
Ketika $dL < d < dU$, maka data hasil penelitian tidak dapat disimpulkan
- b. Terjadi Autokorelasi Negatif
Ketika $(4-d) < dL$, data hasil penelitian mengalami autokorelasi negatif
Ketika $(4-d) > dU$, data hasil penelitian terhindar autokorelasi negatif
Ketika $dL < (4-d) < dU$, maka data hasil penelitian tidak ada kesimpulan³¹

³¹ Echo Perdana, 52.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.576 ^a	.331	.310	2.29332	1.797

- a. Predictors: (Constant), Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Responsibilitas Pemerintah Desa
 b. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat
 Olahan Output SPSS 16.0

Dari output tabel 5 tersebut, dapat dilihat hasil *Durbin-Watson* 1,797. Sehingga jika dilihat pada tabel *Durbin-Watson* akan diperoleh data seperti berikut:

N	d	K	dL	dU	4-dL	4-dU
97	1,797	3	1,6063	1,7335	2,3937	2,2665

Sehingga keputusan yang dapat diambil dari tabel diatas yaitu $d (1,797) > dU (1,7335)$. Peneliti menarik kesimpulan bahwa model regresi linier yang digunakan terhindar autokorelasi.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan guna mengetahui nilai residual model regresi antara data satu dengan lainnya apakah terdapat ketidaksamaan variance atau tidak. Apabila residualnya (nilai erornya) menghasilkan varians sama maka dikatakan mengalami homoskedasitas, begitupun sebaliknya apabila variannya berbeda atau bervariasi dikatakan mengalami heteroskedasitas.³² Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: regresi memiliki hasil nilai signifikan di setiap variabel bebas $> 0,05$, yang berarti model bebas dari heteroskedasitas. Namun sebaliknya, ketika regresi menghasilkan nilai signifikan tiap variabel bebas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedasitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedasitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	2.601	1.882		1.382	.170
1					
Transparansi Lap Keuangan	.049	.048	.124	1.026	.307
Akuntabilitas	-.066	.055	-.139	-1.186	.239
Responsibilitas Pemerintah Desa	-.041	.091	-.048	-.455	.650

³² Ali Mauludi, *Analisis Data Dengan Statistik* (Jakarta Timur: Alim's Publishing Jakarta, 2020), 197.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	2.601	1.882		1.382	.170
Transparansi Lap Keuangan	.049	.048	.124	1.026	.307
1 Akuntabilitas	-.066	.055	-.139	-1.186	.239
Responsibilitas Pemerintah Desa	-.041	.091	-.048	-.455	.650

a. Dependent Variable : RES 2
Olahan Output SPSS 16.0

Dapat dilihat tabel 6 tersebut, diketahui hasil signifikansi variabel transparansi laporan keuangan sebesar 0,307, akuntabilitas adalah 0,239, dan responsibilitas pemerintah desa adalah 0,650. Sehingga dapat dikatakan hasil signifikansi ketiga variabel bebas yaitu >0,05, berarti ketiga variabel bebas tersebut tidak terjadi heteroskedasitas.

Regresi Linier Berganda

Uji ini merupakan sebuah uji untuk mengetahui seperti apa keterkaitan diantara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut perhitungan antara 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat:³³

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel terikat
- X₁, X₂, X₃ = Variabel bebas
- a = Bilangan konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien variabel
- e = Error

³³ Ali Mauludi, 89.

Tabel 7
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	6.742	3.261		2.068	.041
1					
Transparansi Laporan Keuangan	.298	.083	.356	3.568	.001
Akuntabilitas	.237	.096	.240	2.469	.015
Responsibilitas Pemerintah Desa	.332	.157	.185	2.110	.038

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat
Olahan Output SPSS 16.0

Terlihat output tabel 7 tersebut, hasil $a = 6,742$, $b_1 = 0,298$, $b_2 = 0,237$, $b_3 = 0,332$, sehingga dapat diolah menjadi persamaan:

$$Y = 6,742 + 0,298 X_1 + 0,237 X_2 + 0,332 X_3 + e$$

Penjabaran hasil persamaan:

1. Nilai konstanta Y (partisipasi masyarakat) adalah 6,742, berarti ketika X_1, X_2, X_3 bernilai nol, maka Y adalah 6,742.
2. Koefisien X_1 (transparansi laporan keuangan) adalah 0,298, berarti ketika X_1 ditingkatkan sebesar 1 satuan maka nilai Y naik sejumlah 0,298. Begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel X_1 setiap 1 satuan maka nilai Y turun sejumlah 0,298.
3. Koefisien X_2 (akuntabilitas) sebesar 0,237, berarti ketika X_2 ditingkatkan sejumlah 1 satuan maka nilai Y akan terjadi kenaikan sejumlah 0,237. Begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel X_2 setiap 1 satuan maka nilai Y turun sejumlah 0,237.
4. Koefisien X_3 (responsibilitas pemerintah desa) sebesar 0,332, berarti apabila X_3 ditingkatkan setiap 1 satuan maka nilai Y naik sejumlah 0,332. Begitupun kebalikannya ketika terdapat penurunan variabel X_3 sejumlah 1 satuan maka nilai Y turun sejumlah 0,332.

Utuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat diuji dengan *Standardized Coefficients Beta* tertinggi. Pada tabel *Standardized Coefficients Beta* terlihat variabel X_1 (transparansi laporan keuangan) memiliki hasil beta lebih tinggi jika dibanding variabel bebas yang lain yaitu sebesar 0,356. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variabel X_1 (transparansi laporan keuangan) merupakan variabel paling berpengaruh terhadap variabel Y (partisipasi masyarakat).

Uji Hipotesis t (Parsial)

Sebagai alat uji melihat pengaruh antar variabel X dan variabel Y secara individual. Hipotesis yang ada akan ditarik kesimpulan lewat hasil hitung nilai koefisien regresi dan

signifikansi pada tiap-tiap variabel penelitian. Adapun pertimbangan peneliti dalam menarik kesimpulan :

1. Ketika Sig. hasil perhitungan $< 0,05$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel X terhadap Y memiliki pengaruh signifikan.
2. Ketika hasil Sig. hasil perhitungan $> 0,05$, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel X terhadap Y tidak ada pengaruh signifikan.

Tabel 8
Uji Hipotesis t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6.742	3.261		2.068	.041
1					
Transparansi Laporan Keuangan	.298	.083	.356	3.568	.001
Akuntabilitas	.237	.096	.240	2.469	.015
Responsibilitas Pemerintah Desa	.332	.157	.185	2.110	.038

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat
Olahan Output SPSS 16.0

$$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,05/2 ; 97-3-1) = 1,985$$

1. Hipotesis 1 : Adanya pengaruh antara transparansi laporan keuangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Pada tabel 8 terlihat hasil X_1 terhadap Y memiliki Sig. sejumlah $0,001 < 0,05$ dan hasil $t_{hitung} 3,568 > t_{tabel} 1,985$. Peneliti menyimpulkan yaitu hipotesis 1 diterima.
2. Hipotesis 2 : Adanya pengaruh antara akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Pada tabel 8 terlihat hasil X_2 terhadap Y memiliki Sig. sejumlah $0,015 < 0,05$ dan hasil $t_{hitung} 2,469 > t_{tabel} 1,985$. Peneliti menarik kesimpulan yaitu hipotesis 2 diterima.
3. Hipotesis 3 : Adanya pengaruh antara responsibilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Pada tabel 8 terlihat hasil X_3 terhadap Y memiliki Sig. sejumlah $0,038 < 0,05$ dan hasil $t_{hitung} 2,110 > t_{tabel} 1,985$. Peneliti menarik kesimpulan yaitu hipotesis 3 diterima.

Uji Hipotesis F (Simultan)

Tujuannya yaitu guna melihat pengaruh antar variabel X dan variabel Y secara simultan atau bersamaan. Hipotesis yang ada akan ditarik kesimpulan dengan hasil hitung nilai koefisien regresi dan signifikansi pada tiap-tiap variabel yang dijadikan penelitian. Setelah dilakukan uji F (simultan) dapat dibuat keputusan:

1. Ketika hasil Sig. < 0,05, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y
2. Ketika hasil Sig. > 0,05, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, tidak ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y

Tabel 9
Uji Hipotesis F (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	242.245	3	80.748	15.353	.000 ^a
	Residual	489.116	93	5.259		
	Total	731.361	96			

a. Predictors: (Constant), Responsibilitas Pemerintah Desa, Akuntabilitas, Transparansi Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat
Olahan Output SPSS 16.0

$$F_{tabel} = F(k; n-k) = F(3; 97-3) = 2,70$$

4. Hipotesis 4 : Adanya pengaruh secara simultan antara transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung.
Pada tabel 9 diatas terlihat secara simultan X_1, X_2, X_3 mempengaruhi Y dengan bukti hasil Sig. sejumlah $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 15,353 > F_{tabel} 2,70$. Peneliti menarik kesimpulan yaitu hipotesis 4 diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Peneliti menggunakan uji tersebut guna mengetahui tingginya kontribusi yang ada pada variabel bebas (transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa) terhadap variabel terikat (partisipasi masyarakat). Nilai dari uji ini yaitu pada angka 0 dan 1. Model penelitian dianggap baik ketika hasil R^2 yang tinggi yaitu jika diatas 80%.³⁴

³⁴ Ratna Wijayanti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 81–82.

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.576 ^a	.331	.310	2.293

a. Predictors: (Constant), Responsibilitas Pemerintah Desa, Akuntabilitas, Transparansi Laporan Keuangan
Olahan Output SPSS 16.0

Hasil output tabel 10 tersebut, terlihat hasil Adjusted R Square sejumlah 0,310, artinya variabel X₁, X₂, X₃ terdapat ada pengaruh pada variabel Y sejumlah $0,310 \times 100 = 31\%$, sisanya 69% adalah faktor lain.

Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung

Sesuai hasil penelitian melalui uji SPSS 16.0 diatas, terlihat bahwa transparansi laporan keuangan secara signifikan mempengaruhi masyarakat ikut serta terlibat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Jadi dapat dikatakan semakin ditingkatkannya transparansi laporan keuangan kepada masyarakat, seperti tersedianya informasi yang bisa dipahami dan kemudahan masyarakat mengakses informasi tersebut, pemerintah desa mempublikasikan mengenai proses kegiatan serta rincian pengeluaran dana desa dalam upaya pembangunan desa. Hal tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan desa. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah desa cenderung tertutup akan berdampak pada engganannya warga desa untuk aktif dan ikut dalam pengembangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung

Sesuai dengan hasil penelitian uji SPSS 16.0 diatas, terlihat bahwa akuntabilitas secara signifikan memiliki pengaruh pada ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Hal ini terjadi karena akuntabilitas yang telah dilakukan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik seperti pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya serta dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintahan desa sendiri, selain itu aparat desa bertanggungjawab, adil, dan inovatif untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian hasil maksimal. Jadi dengan adanya akuntabilitas yang telah dilakukan pemerintah desa mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah cenderung mengabaikan tugas dan tanggung jawab serta tidak memberikan inovasi/dampak terhadap perkembangan desa maka hal tersebut berpengaruh pada engganannya masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan desa.

Pengaruh Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung

Sesuai dengan hasil penelitian uji SPSS 16.0 diatas, terlihat bahwa responsibilitas pemerintah desa secara signifikan memiliki pengaruh pada keaktifan masyarakat ikut serta dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. Hal ini terjadi karena responsibilitas pemerintah desa yang dijalankan sudah baik, dalam hal ini pemerintah desa telah membagi tugas dan wewenang setiap aparat desa agar antara tugas satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih, guna menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi salah satu bukti pemerintah desa tidak lalai pada kewajiban dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang. Untuk menjamin pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki acuan dalam melaksanakan suatu pembangunan, seperti mematuhi peraturan perundang undangan setiap mengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola. Jadi dengan melaksanakan responsibilitas dengan baik akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan desa. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah desa cenderung tidak bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola serta mengabaikan peraturan yang ada maka hal tersebut mempengaruhi kepercayaan warga desa untuk enggan aktif berkontribusi pada upaya pengembangan desa.

PENUTUP

Sesuai dengan hasil uji SPSS 16.0 serta analisis yang dilakukan maka, dapat disimpulkan bahwa: (1) Transparansi laporan keuangan memperoleh hasil $t_{hitung} 3,568 > t_{tabel} 1,985$ dan perolehan Sig. sejumlah $0,001 < 0,05$ sehingga transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung, (2) Akuntabilitas memperoleh hasil $t_{hitung} 2,469 > t_{tabel} 1,985$ dan perolehan Sig. sejumlah $0,015 < 0,05$ sehingga akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung, (3) Responsibilitas pemerintah desa memperoleh hasil $t_{hitung} 2,110 > t_{tabel} 1,985$ dan perolehan Sig. sejumlah $0,038 < 0,05$, sehingga responsibilitas pemerintah desa memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung. (4) Ketiga variabel bebas yaitu transparansi laporan keuangan, akuntabilitas, dan responsibilitas pemerintah desa memperoleh hasil $F_{hitung} 15,353 > F_{tabel} 2,70$ dan perolehan Sig. sejumlah $0,000 < 0,05$, sehingga ketiga variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (5) Hasil uji *Standardized Coefficients Beta* menunjukkan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat adalah variabel transparansi laporan keuangan dengan hasil *Standardized Coefficients Beta* sebesar 0,356.

Sesuai hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, peneliti mengungkapkan beberapa saran diantaranya: (1) Bagi pemerintah desa, diharapkan mampu meningkatkan transparansi terutama dalam mengelola dana desa baik untuk pembangunan maupun untuk kesejahteraan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntabilitas lebih baik dalam aspek pelaksanaan pengelolaan dana desa serta penggunaan dana desa secara menyeluruh tidak hanya untuk kegiatan pemerintahan desa melainkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan mampu meningkatkan responsibilitas dalam aspek bertanggung jawab terhadap dana yang dikelola selain itu pemerintah desa agar lebih sigap dan tanggap dalam merespon segala kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat, (2) Bagi masyarakat, diharapkan lebih

aktif dalam ikut berpartisipasi atau bekerjasama pada musyawarah desa, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di desa, diharapkan masyarakat untuk memberikan kritik serta saran kepada pemerintah desa guna kemajuan desa, (3) Bagi peneliti setelahnya, diharapkan lebih memperluas obyek pengamatan serta menambah macam variabel yang berbeda pada penelitian agar perolehan hasil yang lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Tawai dan Muh Yusuf. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Institute, 2017.
- Al-Hadits*, n.d.
- Al-Qur'an Al-Karim*, n.d.
- Ali Mauludi. *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta Timur: Alim's Publishing Jakarta, 2020.
- . *Statistik 1*. Jakarta Timur: Alim's Publishing Jakarta, 2017.
- Astri Dwi S dkk. "Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik." *Profesional FIS UNIVED* 7, no. 1 (2020): 43-49.
- Bevaola Kusumasari. *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015.
- Dedi Kusmayadi. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Echo Perdana. *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016.
- Eka Aprita Rati dkk. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin." *Bhineka Tunggal Ika* 4, no. 1 (2017): 71-80.
- Emilianus Jaa dan Sulisty. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7, no. 1 (2019): 1-9.
- Hendrik Manosoh. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta Selatan: PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Hindun Barokah. *Indeks Pembangunan Desa 2014 Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minumun Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (2005).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Ratna Wijayanti dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang: Widyagama Press, 2021.
- Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ>.
- Tjahjanulin Domai. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press, 2013.
- Wahyudin Kessa. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi

Dwi Wulan Fitriani, Dyah Pravitasari

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7, no. 1 (2018): 1–7.